

DAFTAR BACAAN

Buku

Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Ed.1, Cet.V, Alumni, Bandung, 2014.

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet.II, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006.

Djamali, R.Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia : Edisi Revisi*, Ed.2, Cet.XIII, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Hadisoeperto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Ed.4, Cet.VII, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Hadiwijaya, Toyib, *Toyib Hadiwijaya Prof. DR Ir H. : Otobiografi*, HIFKA, Bandung, Bogor, 1997.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Ed.Rev, Cet. XI, Djambatan, Jakarta, 2007.

Hermit, Herman, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda : Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet. VI, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.

Perangin, Effendi, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Ed.1, Cet.II, Rajawali, Jakarta, 1991.

Prasetya, Rudhi, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

----- dan A. Oemar Wongsodiwirjo, *Dasar-Dasar Hukum Persekutuan*, Yuridika, Surabaya, 1993.

Said, Muhammad Natzir, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah di Indonesia : Ditinjau dari Segi Hukum Perusahaan*, Alumni, Bandung, 1985.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Ed.1, Cet.II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

----- *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Ed.1, Cet.III, Kencana Prenada, Jakarta, 2013.

----- *Perolehan Hak Atas Tanah*, Revka Petra Media, Surabaya, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 870).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2229).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1963 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Pembubaran B.P.U. P.P.N. Gula dan Karung Goni, B.P.U. P.P.N. Karet, B.P.U. P.P.N. Aneka Tanaman dan B.P.U. P.P.N. Tembakau (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 22).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155).

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Taata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967 Tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara Kedalam Tiga Bentuk Usaha Negara.

Tesis

Prayitno, Cuk, *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Website

www.berdikarionline.com

www.birohukum.pu.go.id

www.jimly.com

www.kbbi.web.id

www.setkab.go.id